

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN
AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN:
STUDI PADA SKPD KABUPATEN/KOTA PROPINSI BANTEN**

Nurhayati Soleha

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract. *Effect of Financial Accounting System Implementation And Control Activities Of Financial Accountability: Studies in SKPD's District/City of Banten Province.* The aim of this research is to analyze the effect of implementation of regional financial accounting system and control activities on financial accountability. The method used in this research is explanatory survey method. The analysis method that used in this research is path analysis. The result of the analysis shown that the implementation of regional financial accounting system and control activities give positive and significant influence simultaneously reaches 55,20% on financial accountability. The second result shown the implementation of regional financial accounting system give positive and significant influence reaches 20,05% on financial accountability. The third result shown the implementation of control activities give positive and significant influence reaches 35,15% on financial accountability.

Keywords: regional financial accounting system, control activities, path analysis, SKPD

Abstrak. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada SKPB Kabupaten/Kota Propinsi Banten.* Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh implementasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan. Metode yang dipergunakan ialah metode survey eksplanatori. Metode analisis yang digunakan ialah analisis jalur. Hasil yang ada menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian memberikan pengaruh simultan yang positif dan signifikan yaitu mencapai 55,20% terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil kedua menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan mencapai 20,05% atas akuntabilitas keuangan. Hasil yang ketiga menunjukkan implementasi aktivitas pengendalian memberikan pengaruh yang positif dan signifikan mencapai 35,15% atas akuntabilitas keuangan.

Kata Kunci: sistem keuangan daerah, kegiatan pengendalian, analisis jalur, SKPD

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah, karena perubahan tersebut mengakibatkan manajemen keuangan semakin kompleks. Terkait reformasi pengelolaan keuangan daerah adalah adanya penggunaan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Halim, 2008). Penggunaan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diaudit (*auditable*) sehingga memudahkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal transparansi pengelolaan keuangan (Daeng M. Nazier, 2006). Perubahan pengelolaan keuangan daerah tersebut, namun masih saja banyaknya opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang "tidak menyatakan pendapat" (TMP) atau *disclaimer* dan Tidak Wajar (TW).

Tabel 1. Perkembangan opini LKPD Tahun 2004-2009

LKPD	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2004	21	7%	249	87%	10	4%	7	2%	287
Tahun 2005	17	5%	308	85%	12	3%	25	7%	362
Tahun 2006	3	1%	327	70%	28	6%	105	23%	463
Tahun 2007	4	1%	283	60%	59	13%	122	26%	468
Tahun 2008	12	3%	324	67%	31	6%	116	24%	483
Tahun 2009*	14	4%	259	74%	30	9%	45	13%	348

Sumber: IHPS I BPK, 2010

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah pada Tahun 2004-2009 masih menunjukkan banyak kelemahan. Hal ini terlihat pada kualitas opini LKPD yang belum baik, ditunjukkan dengan rendahnya persentase opini WTP, turunnya persentase WDP tahun 2007/2008 dibandingkan dengan tahun 2004/2005 dan kenaikan persentase opini TMP dan TW. Dengan kata lain, semakin banyak persentase LKPD yang informasi keuangannya tidak dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan, sedangkan persentase LKPD yang informasi keuangannya dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan masih sedikit. Padahal

dengan diterapkannya sistem akuntansi seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang merupakan akuntabilitas pemerintah daerah semakin baik sehingga meningkatnya *good governance*. Menurut BPK (2010), masih banyaknya opini TMP dan TW yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern pemerintah daerah belum optimal. Kelemahan pengendalian intern atas pemerintah daerah sebagian besar karena belum memadainya unsur lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian. Kelemahan dalam lingkungan pengendalian terlihat dari kurang dipahaminya tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja serta kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan. Sedangkan, kelemahan atas aktivitas pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan transaksi yang akurat dan tepat waktu, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, dan pendokumentasian yang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian penting. Lemahnya pengendalian intern tersebut dapat mengakibatkan kerugian daerah.

Perubahan dalam pengelolaan keuangan negara yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah dalam hubungannya dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, hakekat otonomi daerah harus tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penelitian yang terkait dengan penerapan sistem akuntansi dan aktivitas pengendalian telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang berhubungan dengan sistem akuntansi, aktivitas pengendalian dan akuntabilitas keuangan dilakukan oleh Pieter, Janet dan James (1996) meneliti akuntansi dengan akuntabilitas dengan hasil terdapat pengaruh akuntansi terhadap akuntabilitas. Cox, Nix dan Wichman (1989) menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan memberikan pengendalian terhadap anggaran. Kery Soetjipto (2005), menunjukkan adanya pengaruh langsung penerapan sistem akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas publik. Goddard, et al., (1994), Pieter et al., (1996) dan Jacobs, et al., (2004) mengatakan adanya peran akuntansi terhadap akuntabilitas. Berry (2005) meneliti akuntabilitas dan

kontrol di organisasi gereja yang merupakan organisasi sosial di Inggris. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah terdapat pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian secara bersama-sama terhadap akuntabilitas keuangan? Apakah terdapat pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan? Apakah terdapat pengaruh penerapan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan.

METODE

Populasi yang menjadi pengamatan dalam penelitian ini adalah SKPD di 6 (enam) Kabupaten/Kota pada Provinsi Banten yang memiliki pos pendapatan dan belanja. SKPD terdiri dari Badan, Dinas dan Kantor, sedangkan SKPD kecamatan tidak dimasukkan ke dalam populasi penelitian. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *area probability sampling* yaitu teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi. Ukuran sampel sebesar n selanjutnya dialokasikan (disebarkan) ke seluruh kabupaten/kota. Responden penelitian ini adalah Kepala SKPD dengan pertimbangan bahwa merekalah yang menjadi tanggung jawab dalam melakukan sistem akuntansi keuangan daerah SKPD dan aktivitas pengendalian SKPD, sedangkan responden auditor intern pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu inspektorat untuk mengukur akuntabilitas keuangan SKPD.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian

Kuesioner	Jumlah Pernyataan	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	22	0,862	Reliabel
Aktivitas pengendalian	15	0,823	Reliabel
Akuntabilitas keuangan	13	0,858	Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data

Variabel independen pada penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) (X_1) dan penerapan aktivitas pengendalian (X_2). Sedangkan variabel dependen adalah akuntabilitas keuangan (Y). Agar penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka perlu dipahami konsep operasional dan indikator variabel penelitian.

PEMBAHASAN

Uji kualitas data meliputi validitas dan ujirealibilitas. Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi *product moment*. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji *cronbach alpha* menggunakan SPSS. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* >0,60 (Nunnaly, 1967 dalam Imam, 2005). Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel 2.

Tabel 3. Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Tentang Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor	Kriteria
1	Organisasi SAKD	1231	1470	83,74%	Baik
2	Dokumen Sumber Pembukuan	466	490	95,10%	Sangat Baik
3	Catatan	211	245	86,12%	Sangat Baik
4	Prosedur	2113	2450	86,24%	Sangat Baik
5	Laporan Keuangan	632	735	85,99%	Sangat Baik
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah		4653	5390	86,33%	Sangat Baik

Sumber: Hasil pengolahan data

Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi jumlah skor tanggapan responden diadopsi dari Sugiyono (2009;135) yaitu berdasarkan persentase skor jawaban responden.

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa secara rata-rata penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sudah masuk dalam kategori sangat baik. Akan tetapi masih perlu dilakukan peningkatkan organisasi SAKD agar ke depannya kategorinya dapat meningkat menjadi sangat baik.

Tabel 4 menunjukkan tanggapan responden tentang aktivitas pengendalian, dimana secara keseluruhan responden memberikan tanggapan sangat baik terhadap aktivitas pengendalian. Namun terdapat beberapa catatan terkait dengan pemisahan tugas, pengendalian fisik atas aset dan catatan, serta verifikasi independen yang perlu dilakukan peningkatan kinerja. Hal ini agar ke depannya tanggapan responden tentang aktivitas pengendalian dapat meningkat dan masuk dalam kriteria sangat baik.

**Tabel 4. Rekapitulasi Persentase Skor
Tanggapan Responden Tentang Aktivitas Pengendalian**

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor	Kriteria
1	Pemisahan tugas yang memadai	196	245	80,00%	Baik
2	Otorisasi yang sesuai dari transaksi dan aktivitas	877	980	89,49%	Sangat Baik
3	Dokumen dan catatan yang memadai	911	980	92,96%	Sangat Baik
4	Pengendalian fisik atas aset dan catatan	405	490	82,65%	Baik
5	Verifikasi Independen	818	980	83,47%	Baik
	Aktivitas Pengendalian	3207	3675	87,27%	Sangat Baik

Sumber: Hasil pengolahan data

Tabel 5 menunjukkan tanggapan responden tentang akuntabilitas keuangan. Secara umum responden memberikan tanggapan tinggi terhadap akuntabilitas keuangan. Hanya ada satu instrumen yang dapat mencapai kriteria sangat tinggi yaitu akuntabilitas kinerja keuangan dinilai secara objektif dan independen.

**Tabel 5. Rekapitulasi Persentase Skor
Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas Keuangan**

No	Instrumen	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor	Kriteria
1	Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	761	980	77,65%	Tinggi
2	Penilaian kinerja keuangan	691	980	70,51%	Tinggi
3	Adanya Informasi yang handal	577	735	78,50%	Tinggi
4	Akuntabilitas kinerja keuangan dinilai secara objektif dan independen	208	245	84,90%	Sangat Tinggi
5	Tindak lanjut terhadap laporan	191	245	77,96%	Tinggi
	Akuntabilitas Keuangan	2428	3185	76,23%	Tinggi

Sumber: Hasil pengolahan data

Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan maka data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*).

Tabel 6. Koefisien Jalur Masing-Masing Variabel Independen Terhadap Akuntabilitas Keuangan

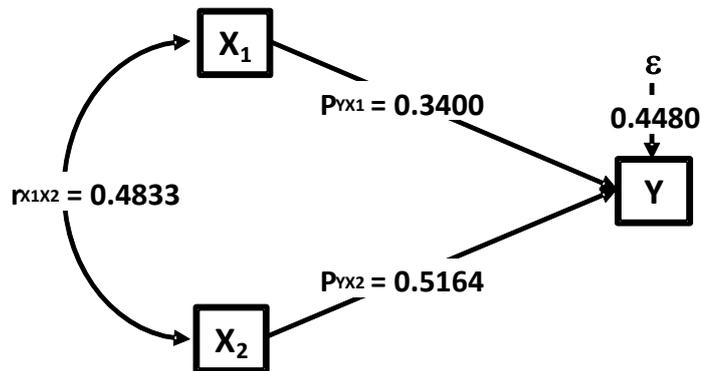
Variabel	Koefisien Jalur	t _{hitung}	R ² = 0,5520
X ₁	0,3400	3,0163	
X ₂	0,5164	4,5807	

Sumber: Hasil pengolahan data

Secara bersama-sama kedua variabel independen (penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan aktivitas pengendalian) memberikan kontribusi/pengaruh sebesar **55,20%** (nilai R²) terhadap akuntabilitas keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Sementara sisanya sebesar **44,80%** dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar kedua variabel independen. Persamaan koefisien jalur dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = 0,34 X_1 + 0,5164 X_2 + 0,4480$$

Persamaan tersebut dapat digambarkan dalam model struktural seperti terlihat pada gambar 1. berikut.



Gambar 1. Diagram dan Koefisien Jalur

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa tabel F untuk tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas (2;46) diperoleh nilai F tabel sebesar 3,200. Karena dari hasil penelitian diperoleh nilai F_{hitung} dan lebih besar dibanding F_{tabel}, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H₀ sehingga H_a diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

Tabel 7. Hasil Pengujian Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Koefisien Jalur	t _{-hitung}	t _{-tabel (db:46)}	Ho	Ha
0,3400	3,0163	2,013	Ditolak	Diterima

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dilihat nilai t_{-hitung} variabel penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (3,0163) lebih besar dari t_{tabel} (2,013). Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{tabel}, maka dengan tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Artinya dengan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik akan meningkatkan akuntabilitas keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

Tabel 8. Besar pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas keuangan

Pengaruh Langsung	$(0,3400) \times (0,3400) = 0,1156$ (11,56%)
Melalui aktivitas pengendalian	$(0,3400) \times (0,4833) \times (0,5164) = 0,0849$ (8,49%)
Total	20,05%

Sumber: Hasil pengolahan data

Total pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten **20,05%** dengan arah positif, artinya 20,05% perubahan yang terjadi pada akuntabilitas keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten dapat dijelaskan oleh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Tabel 9. Hasil Pengujian Pengaruh Aktivitas pengendalian Terhadap Akuntabilitas keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Koefisien Jalur	t _{-hitung}	t _{-tabel (db:46)}	Ho	Ha
0,5164	4,5807	2,013	ditolak	Diterima

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dilihat nilai $t_{\text{-hitung}}$ variabelaktivitas pengendalian (4,5807) lebih besar dari t_{tabel} (2,013). Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{tabel} , maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Artinya dengan aktivitas pengendalian yang baik akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

Tabel 10. Besar pengaruh penerapan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan

Pengaruh Langsung	$(0,5164) \times (0,5164) = 0,2666$ (26,66%)
Melalui SAKD	$(0,5164) \times (0,4833) \times (0,3400) = 0,0849$ (8,49%)
Total	35,15%

Sumber: Hasil pengolahan data

Total pengaruh aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuanganpada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten 35,15% dengan arah positif, artinya 35,15% perubahan yang terjadi pada akuntabilitas keuanganpada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bantendapat dijelaskan oleh aktivitas pengendalian.

Bahtiar Arif, dkk (2009:162) mengatakan bahwa sistem akuntansi meliputi: organisasi penyelenggara, prosedur pokok, formulir, catatan dan laporan keuangan. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo

Permendagri No. 59 Tahun 2007 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah:

“Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Menurut Arens et. al (2006) adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah diambil untuk mengatasi resiko dalam pencapaian sasaran. Aktivitas Pengendalian menurut COSO adalah sebagai berikut:

“Control activities are the policies and procedures that help ensure management directives are carried out. They help ensure that necessary actions are taken to address risks to achievement of the entity's objectives. Control activities occur throughout the organization, at all levels and in all functions.”

Arens et al, (2006) mengatakan bahwa aktivitas pengendalian umumnya berhubungan dengan kebijakan dan prosedur yang bersinggungan dengan: (1) Pemisahan tugas yang memadai; (2) Otorisasi yang sesuai dari transaksi dan aktivitas; (3) Dokumen dan catatan yang memadai; (4) Pengendalian fisik atas aset dan catatan; dan (5) Pemeriksaan independen atas kinerja.

Akuntabilitas keuangan menurut Abdul Halim (2008:254) merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Premchand (1999:18) bahwa *“the main instruments of financial accountability are government budgets, periodically published data on public finances, annual accounts, and the investigative and other general reports prepared by independent agencies”*.

Akuntabilitas keuangan menurut Tatag Wiranto (2009:2) fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik,

yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Perhatian khusus diberikan pada kinerja dan nilai uang serta penegakan sanksi untuk mengantisipasi dan mengatasi penyalahgunaan, mismanajemen, atau korupsi.

Keterkaitan sistem akuntansi dengan pengendalian dikatakan oleh Freeman dan Shoulders (2003) mengatakan bahwa akuntansi dan pelaporan pemerintahan biasanya menekankan pada pengendalian dan akuntabilitas atas sumber daya finansial yang dibelanjakan. Penelitian yang dilakukan oleh Cox, Nix dan Wichman (1989) menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan memberikan pengendalian terhadap anggaran. Penelitian pada 1400 kota di Amerika Serikat dan Canada. Manajer keuangan pemda menyakini bahwa sistem akuntansi memberikan tingkat pengendalian. Top manajemen pada pemerintah daerah harus menyadari pentingnya teknik akuntansi yang banyak manfaatnya seperti pada sektor bisnis.

Mardiasmo (2006) menyatakan hasil akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Selanjutnya, Daeng M. Nazier (2006) menyatakan laporan keuangan memiliki empat kepentingan, yaitu akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi. Sebagai akuntabilitas, artinya suatu instansi pemerintah seharusnya mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan secara periodik.

Penelitian yang dilakukan oleh Kery Soetjipto (2005), menunjukkan adanya pengaruh langsung penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang besar terhadap akuntabilitas publik, disebabkan pertanggungjawaban terutama pada produk sistem akuntansi. Penelitian Goddard, et al., (1994), Pieter et al., (1996) dan Jacobs, et al., (2004) mengatakan adanya peran akuntansi terhadap akuntabilitas. Adanya pengendalian merupakan suatu mekanisme yang dibangun untuk melakukan *check and balances* untuk menjamin kepatuhan

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dalam penyajian pelaporan keuangan harus mengacu pada standar profesional yang berlaku. Dengan demikian maka pemerintah daerah dalam penyajian pelaporan keuangan kepada publik harus mengacu pada standar profesional yang berlaku yaitu standar akuntansi pemerintah. Steinhorsdotir (2003:97) menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan aspek yang sangat penting dari *corporate governance*. Manajemen menggunakan sistem pengendalian untuk menjamin tujuan organisasi tercapai. Pengendalian intern memainkan peran yang signifikan bagi organisasi terhadap terciptanya *good corporate governance*, hal tersebut menjadikan perusahaan untuk memenuhi praktek pengelolaan perusahaan yang baik. Proses pengendalian intern harus dipandang secara realistis, yang memberikan jaminan yang *reasonable* yang melegitimasi bahwa tujuan akan tercapai. Maksud tersebut dapat pula diterapkan pada pemerintahan. Berry, Anthony J. (2005) meneliti akuntabilitas dan pengendalian di organisasi gereja yang merupakan organisasi sosial di Inggris. Akuntabilitas ini terdiri dari perjanjian, konstitusi dan kontrak (*covenant, constitution and contract*). Dewan keuskupan dalam akuntabilitas kepada muktamar umum dengan cara: laporan hasil, membuat anggaran, memberikan akun yang telah diaudit, memberikan laporan reguler dari bisnis. Berry, Anthony J. (2005) menunjukkan adanya hubungan antara pengendalian dan akuntabilitas.

SIMPULAN

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Tingkat keeratan hubungan kausalitas sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan memiliki tingkat hubungan yang sedang dengan memberikan pengaruh yang signifikan. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan SKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Penerapan aktivitas pengendalian yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan SKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Meningkatkan pemahaman tentang manfaat penerapan SAKD dalam pengelolaan keuangan Negara/daerah. Oleh karena itu, disarankan kepada setiap SKPD untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam bidang akuntansi dan pengelola keuangan negara melalui meminta bantuan tenaga akuntan dari BPKP, merekrut tenaga-tenaga akuntan, mengirimkan pejabatnya pada berbagai perguruan tinggi yang memiliki jurusan akuntansi ataupun berbagai pelatihan kedinasan mengenai administrasi keuangan negara.

Meningkatkan peran auditor intern yakni berfokus pada fungsi pengendalian sebagai bagian dari fungsi manajemen pemerintahan dengan melakukan pembinaan terhadap SKPD, evaluasi secara periodik melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya. Bagi peneliti yang lain, perlu dilakukan penelitian lebih luas terhadap variabel-variabel lain di luar variabel bebas yang peneliti uji. Misalnya memasukan Sistem Informasi Manajemen, unsur lingkungan pengendalian dan monitoring.

PUSTAKA ACUAN

- Afiah, N.N. 2009. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana
- Aren, A.A. et.al. 2006. *Auditing and Assurance Services – An Integrated Approach*. New York: Pearson Education.
- Bastian, I. 2007, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- BPK RI. 2009. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2009*. Jakarta: BPK RI.
- Cox, C.T. et.al 1989. *Responsibility Accounting And Operational Control For Government unit*. Accounting Horizons; Jun Vol.3, No. 2. pp. 38.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2007. *Modul Akuntansi Pemerintah Daerah*. Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri
- Degeling, P & J. Anderson. 1996. *Accounting for Public Accounts Commitees*. Accounting, Auditing and Accountability Journal. Vol.9. No.2.
- Freeman, R.J & C.D. Shoulders. 2003. *Governmental and Nonprofit Accounting: Theory and Practice*. New York: Pearson Education, Inc.

- Gibbins, M & J.D. Newton. 1994. *An Empirical Exploration of Complex Accountability in Public Accounting*. Journal of Accounting Research, Vol. 32 No. 2.
- Goddard, A. 2000. *Budgetary practices and accountability habitus: A grounded theory*. Accounting, Auditing & Accountability Journal; Vol 17, No. 4; ABI/INFORM Global. pp. 543
- Goddard, A & J. Powell. 1994. *Accountability and Accounting/ Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol.7. No.2.
- Halim, A. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nazier, D.M. 2006. *Arah Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri 29 Tahun 2002 Pasca Pemberlakuan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1
- Nordiawan, D. et.al. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Osborne, D. & T. Gaebler. 1999. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Jakarta: Teruna Grafica.
- Steccolini, Ileana. 2002, "Local Government Annual Report: an Accountability Medium?" EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms, Dublin, September 2002.
- Steinthsorsdotir, Lilja, 2003, "Internal Control: Corporate Governance, Internal Audit and Strategi Renewal", Monetary Bulletin.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tampubolon, R. 2006. *Risk and Systems-Based Internal Auditing*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Thompson, J. 2003. *Accountability and audit*. International Journal of Government Auditing; Apr; Vol. 30, No. 2; ABI/INFORM Global. pp. 16
- Wilson & Kattelus. 2004. *Accounting for Governmental and Non Profit Entities*. New York: The Mc. Graw Hill.
- Yi Lu. 2007. *Implication of GASB Statement no. 34 for Reporting and Accountability: The Georgia Experience*. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, (19) 3: pp. 317-327.